

**SEKURITISASI ISU PERUBAHAN IKLIM: STUDI ANCAMAN
KENAIKAN PERMUKAAN LAUT TUVALU**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Oleh:

NINA NOVITA SARI

2210852031

Dosen Pembimbing:

Apriwan, S.Sos., M.A., P.hD

Rifki Dermawan, S.Hum., M.Sc

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Kajian mengenai perubahan iklim selama ini masih didominasi oleh perspektif yang memandang kenaikan permukaan laut sebagai ancaman fisik objektif, sehingga proses politik yang mengubah ancaman tersebut menjadi isu keamanan belum banyak dibedah secara mendalam. Kondisi ini menyisakan kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana negara kepulauan dataran rendah mengonstruksi, menyebarkan, dan melegitimasi klaim ancaman kenaikan permukaan laut hingga menghasilkan kebijakan luar biasa. Sementara hukum internasional belum memiliki preseden yang menjamin keberlangsungan negara tanpa wilayah daratan permanen. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi perubahan iklim yang dilakukan Pemerintah Tuvalu terhadap ancaman kenaikan permukaan laut pada periode 2021 hingga pertengahan tahun 2026. Penelitian menggunakan teori sekuritisasi Thierry Balzacq dengan fokus pada *level of Acts*. Dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis, data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Tuvalu, pidato pada forum internasional, dokumen hukum, perjanjian internasional, serta laporan organisasi internasional. Hasil penelitian mencakup tiga tahap proses sekuritisasi. Tahap pertama ditandai dengan konstruksi ancaman melalui tindakan diskursif yang membingkai kenaikan permukaan laut sebagai ancaman eksistensial terhadap wilayah, kedaulatan, dan keberlangsungan negara Tuvalu. Tahap kedua penyebaran ancaman eksistensial tersebut ke berbagai forum yang dilakukan oleh Tuvalu. Tahap ketiga diwujudkan melalui tindakan luar biasa berupa pembentukan kebijakan, seperti Constitutional Amendment Act 2023, Digital Nation, Rising Nations Initiative, dan Falepili Union Treaty, yang diarahkan untuk mempertahankan keberlanjutan status kenegaraan serta hak kedaulatan Tuvalu di tengah ancaman perubahan iklim. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi perubahan iklim di Tuvalu berkembang dari pembentukan narasi ancaman menjadi tindakan kelembagaan yang menghasilkan kebijakan konkret untuk mempertahankan eksistensi negara.

Kata kunci: sekuritisasi, perubahan iklim, Tuvalu, kenaikan permukaan laut, Thierry Balzacq.

ABSTRACT

Research on climate change has been dominated by a perspective that views sea-level rise as an objective physical threat, so the political processes that transform this threat into a security issue have not yet been analyzed in depth. This situation leaves a gap in understanding regarding how low-lying island nations construct, disseminate, and legitimize claims of the threat of sea-level rise to the point of producing extraordinary policies, while international law lacks precedents that guarantee the survival of states without permanent land territory. This study aims to analyze the process of climate change securitization undertaken by the Government of Tuvalu regarding the threat of sea-level rise from 2021 through mid-2026. The study employs Thierry Balzacq's securitization theory, focusing on the "level of Acts". Using a qualitative research design with a descriptive-analytical approach, data were collected through a literature review drawing on official Tuvalu government documents, speeches at international forums, legal documents, international treaties, and reports from international organizations. The research findings cover three stages of the securitization process. The first stage is characterized by the construction of the threat through discursive actions that frame sea-level rise as an existential threat to Tuvalu's territory, sovereignty, and survival. The second stage involved Tuvalu's dissemination of this existential threat across various forums. The third stage was realized through extraordinary policy-making measures, such as the Constitutional Amendment Act of 2023, the Digital Nation initiative, the Rising Nations Initiative, and the Falepili Union Treaty, all aimed at preserving the sustainability of Tuvalu's statehood and its sovereign rights in the face of the threat of climate change. This study shows that the securitization of climate change in Tuvalu has evolved from the construction of a threat narrative into institutional actions that have resulted in concrete policies to preserve the nation's existence.

Keywords: securitization, climate change, Tuvalu, sea-level rise, Thierry Balzacq.

